

Kontestasi di Ruang Publik: Studi Kasus pada Program Dialog Interaktif di Ratih TV Kebumen dan ATV Kota Batu

I Gusti Ngurah Putra^{1*}

¹Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Kemunculan lembaga penyiaran publik lokal di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia membuka ruang publik yang memungkinkan kontestasi gagasan di tingkat lokal sehingga dapat menjadi masukan bagi proses pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal. Masalahnya, apakah ruang publik itu benar bisa menjadi ruang kontestasi gagasan oleh publik lokal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontestasi gagasan berlangsung di ruang publik dengan menggunakan kasus siaran dialog interaktif pada Ratih TV Kebumen dan Agropolitan TV (ATV) Kota Batu. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan isu, aktor dan kepentingan. Penelitian ini menemukan, Ratih TV memunculkan aktor-aktor yang mewakili lembaga pemerintah sedangkan ATV memberi ruang yang memadai kepada aktor non pemerintah. Walaupun demikian, kedua media bukan menyediakan ruang bagi kontestasi gagasan, tetapi lebih terkesan sebagai ruang untuk promosi gagasan tanpa melalui kontestasi. Sebagai ruang publik, kedua media belum sepenuhnya menjadi ruang yang memungkinkan berbagai pihak untuk berdebat tentang persoalan-persoalan lokal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal.

Kata-kata Kunci: Ruang publik; Dialog interaktif; Kontestasi; Ratih TV; ATV

Contestation in the Public Sphere: Case Study of the Interactive Dialogue Programs on Ratih TV Kebumen and ATV Batu City

ABSTRACT

The emergence of local public broadcasting institutions in several districts and cities in Indonesia opens up a public sphere that allows the contestation of ideas at the local level so that they can become input for the public policy making process at the local level. The problem is, can public sphere really be a space for the contestation of ideas by the local public? This research aims to find out how the contestation of ideas takes place in public sphere using the case of interactive dialogue broadcasts on Ratih TV Kebumen and Agropolitan TV (ATV) Batu City. Data is analyzed using descriptives analysis to describe issues, actors and interests. This research found that Ratih TV gave rise to actors representing government institutions, while ATV provided a capable space for non-government actors. However, these two media do not provide space for the contestation of ideas, but rather appear as a space for promoting ideas without contestation. As public sphere, the two media have not yet fully become spaces that allow various parties to debate local issues that can influence the public policy-making process at the local level.

Keywords: Public sphere; Interactive dialogue; Contestation; Ratih TV; ATV

*Korespondensi: Drs. I Gusti Ngurah Putra, M.A. Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Jl Sosio Yustisia No. 2 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281. Email: gnputra@ugm.ac.id.

PENDAHULUAN

Kemunculan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) di beberapa daerah di Indonesia tidak saja membuka ruang bagi kemunculan beragam isu (visibility) dan beragam kepentingan serta beraneka anggota masyarakat (inclusiveness) terutama melalui program pemberitaan, tetapi juga membuka ruang kontestasi (contestation) berbagai gagasan yang berkembang dalam masyarakat (Koopmans & Statham, 2010). Baik Ratih TV di Kebumen Jawa Tengah maupun Agropolitan TV (ATV) di Kota Batu membuka ruang bagi kemunculan beragam masalah atau isu dan tokoh masyarakat atau figur publik melalui pemberitaan dan juga program dialog interaktif di samping melalui program-program hiburan. Program dialog interaktif di Ratih TV, misalnya, menjadikan beberapa persoalan publik mendapat perhatian dari otoritas sehingga segera dicarikan solusi (Putra, 2017). Ini secara teoritik akan berimplikasi pada semakin tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan warga di kedua daerah itu terhadap berbagai persoalan di tingkat lokal di kedua daerah. Pengetahuan demikian menjadi dasar penting bagi warga masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan politik yang tersedia. Tentu saja, hal demikian bisa terjadi dengan asumsi adanya kebebasan yang dimiliki oleh para pengelola kedua Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam membuat liputan dan menentukan topik-topik untuk diperdebatkan dalam kedua LPPL itu.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sejumlah pakar sudah lama mengingatkan bahwa krisis komunikasi publik di berbagai tempat (Blumler, 2018; Blumler & Gurevitch, 1995) memunculkan kepesimisan atas semakin tergerusnya ruang publik. Salah satu isu yang ditengarai sebagai penyebab adanya krisis komunikasi publik adalah semakin terkendalinya media massa di tangan kekuatan para pemodal. Kebebasan atau kemandirian media sebagai ruang publik dalam keadaan muram atau dalam ungkapan Buehler (Buehler, 2010) terjadinya marginalisasi ruang publik. Walaupun demikian ada yang juga yang masih optimis akan keberadaan ruang publik. Aspinall & Berenchot (2019:318-322) melihat ruang publik lokal Indonesia tidak sepenuhnya suram. Mereka melihat di beberapa daerah ruang publik masih menjadi faktor penting yang dapat mendorong proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang melayani warga masyarakat; pemimpin lokal yang tidak saja mengandalkan kebijakan yang populis tetapi juga kebijakan substantif yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Mereka menggunakan kasus Surabaya sebagai contoh. Namun demikian, Aspinall dan Berenchot (2019: 320) juga melihat daerah seperti di Kalimantan Tengah tidak memiliki ruang publik seperti di Surabaya yang dicirikan antara lain dengan ketiadaan liputan yang kritis oleh media massa karena media yang ada dimiliki oleh pengusaha yang merupakan keluarga politisi yang ikut berkompetisi.

Keberadaan media sebagai ruang publik yang oleh Habermas didefinisikan sebagai ruang yang memungkinkan warga negara berdebat secara rasional tentang persoalan-persoalan bersama tanpa ada intervensi baik dari kekuatan politik, ekonomi bahkan kekuatan sosial politik sehingga bisa terbentuk pendapat umum (Habermas, 1989), tidak bisa diabaikan dalam konteks demokrasi, termasuk di Indonesia. Salah satu ruang publik penting adalah media massa (Butsch, 2007) yang berfungsi antara lain memberitakan berbagai peristiwa atau realitas sosial. Peristiwa ketika menjadi berita di media massa pada dasarnya menunjukkan ketertampakan (visibility) suatu kejadian atau gagasan kepada publik. Pemilihan isu, peristiwa, aktor untuk dimunculkan dalam pemberitaan sangat ditentukan oleh politik keredaksian pengelola ruang publik. Studi yang dilakukan Dhakidae (Dhakidae, 1991) tentang pergeseran pers Indonesia dari pers perjuangan menjadi pers industri memperlihatkan antara lain kecenderungan-kecenderungan media sebagai ruang

publik telah berubah menjadi intitusi bisnis sehingga pemberitaan media pun sedikit bergeser menjadi lebih memperhatikan aspek-aspek media sebagai lembaga bisnis. Pada level korporasi, kebijakan keredaksian bisa lebih diarahkan untuk melayani kepentingan kelas menengah atas yang menjadi sumber penghidupan pers sebagai industri. Pada level praktek pemberitaan, fokus pemberitaan diarahkan pada isu-isu yang sesuai dengan kepentingan pembaca atau konsumen media.

Dalam kasus di Indonesia, terdapat ketimpangan kehidupan media lokal antar-daerah. Media sebagai ruang publik di daerah tertentu memiliki basis pendapatan yang lebih bervariasi sehingga dalam melakukan peliputan dan dalam menjadi ruang publik lebih bebas menyajikan pemberitaan. Sementara media lokal di beberapa daerah yang basis penghidupannya tidak stabil dan cenderung tergantung pada pemasok biaya yang terbatas, tidak sepenuhnya mampu menjadi ruang publik yang bebas untuk menyajikan pemberitaan-pemberitaannya, terutama terhadap mereka yang telah menjadi sumber kehidupannya (Aspinall & Berenchot, 2019).

Dimensi penting dari sebuah ruang publik adalah adanya kontestasi berbagai aktor untuk mengusung berbagai isu dan klaim. Ruang publik menyediakan aktor-aktor lokal ruang untuk kontestasi. Keberadaan ruang publik sangat penting sebagai ruang tempat warga negara beradu gagasan, memperjuangkan kepentingan sehingga media sebagai ruang publik sering menjadi salah satu indikator penting dalam menilai demokrasi (Clemens, 2010; Guidry & Sawyer, 2003; Koopmans & Statham, 2010; McLaverty, 1998; Shin, 2019; Tilly, 2007). Argumen di balik itu antara lain karena ruang publik menyediakan tiga hal penting yakni *visibility*, *inclusiveness* dan kontestasi (Statham, 2010). *Visibility*/ketampakan merupakan sebuah dimensi penting dari ruang publik karena ruang publik menjadikan semua hal menjadi suatu yang tampak, muncul dan dapat diketahui oleh publik. Pemberitaan dalam media massa menjadi contoh dari ketampakan. Berbagai kejadian dan masalah yang mendapat liputan media menjadi hal yang diketahui/tampak di kalangan publik yang lebih luas.

Inclusiveness berarti ruang publik melibatkan semua elemen atau kelompok dalam masyarakat. Pemberitaan media massa atau berbagai program lain dalam media massa pada dasarnya melibatkan banyak orang (Statham, 2010: 5). Dalam dunia jurnalisme dikenal adanya prinsip *cover both sides* atau bahkan *cover multisides*. Peliputan yang melibatkan atau memberi kesempatan kepada banyak pihak untuk memberi kesaksian atau pandangan mereka terhadap sebuah masalah sehingga dunia jurnalisme mampu memenuhi janji sucinya yakni menemukan dan menyampaikan kebenaran (Ettema et al., 1987).

Kontestasi artinya ruang publik menjadi tempat kontestasi atau pertarungan berbagai aktor dengan berbagai kepentingannya sehingga pada akhirnya bisa diharapkan sebuah konsensus atau kesepakatan di antara berbagai aktor dan elemen dalam masyarakat. Dalam ungkapan Habermas, ruang publik menyediakan tempat dan juga iklim atau suasana yang memungkinkan berbagai elemen masyarakat berdiskusi mengenai berbagai persoalan bersama secara rasional dan bebas tanpa dipaksa baik oleh kekuatan pasar, negara atau bahkan kekuatan-kekuatan sosio-kultural yang ada sehingga akan terwujud pendapat umum (Habermas, 1989).

Kajian-kajian tentang ruang publik di Indonesia saat ini sudah begitu berkembang baik dalam ranah disiplin komunikasi dan kajian media seperti yang dilakukan Astuti (Astuti, 2015) Faisal (Faisal et al., 2018) maupun oleh peneliti lain dalam disiplin politik (Arditama, 2016) dan dalam disiplin sosiologi (Qodir, 2011, 2015). Dari berbagai kajian yang ada, kajian

tentang kontestasi di ruang publik yang dilakukan Astuti mengkaji kontestasi di ruang publik Radio Salatiga. Kajian kontestasi ruang publik media televisi lokal tampaknya belum ada. Oleh karena itu, riset ini akan mengkaji kontestasi di ruang publik dengan menggunakan studi kasus pada ATV Kota Batu dan Ratih TV Kabupaten Kebumen.

Ruang publik yang tercipta dalam media penyiaran lokal memang sangat tergantung kepada para pengelola dan juga kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh lembaga yang menaungi masing-masing media. Namun demikian, adanya program dialog interaktif yang ditayangkan baik oleh Ratih TV maupun oleh ATV membuka peluang terjadinya kontestasi di ruang publik. Oleh karena itu, riset ini mengajukan pertanyaan, bagaimana kontestasi yang berlangsung di kedua ruang publik ini? Isu-isu apa yang menonjol dalam kontestasi itu dan kepentingan apa yang diperjuangkan oleh masing-masing aktor?

METODE PENELITIAN

Jika dilacak secara historis, ada dua kota/kabupaten di Pulau Jawa yang sejak awal reformasi membangun ruang publik baru bagi warga mereka dengan mendirikan media yang secara teoritis dan praktis memiliki daya jangkau lebih luas baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun dari sisi akses warga masyarakat terhadap media itu, yakni Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah mendirikan Ratih TV dan Kota Batu di Jawa Timur membangun Agropolitan TV. Walau dalam perjalanan kedua media ini terjadi pasang surut dan kembang kempisnya dukungan pemimpin di kedua daerah ini, sampai saat ini kedua TV lokal ini akhirnya secara legal diakui sebagai lembaga penyiaran publik lokal dengan adanya IPP yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Oleh karena itu, kedua media lokal ini dipilih sebagai ruang publik yang menjadi arena berbagai kontestasi kepentingan di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan studi kasus deskriptif (Yin, 2018) dengan memilih acara dialog interaktif yang ditayangkan di kedua TV sebagai wujud ruang publik. Kedua acara ini akan dianalisis secara deskriptif dengan melihat isu-isu apa yang menjadi materi kontestasi, aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan apa yang diperjuangkan oleh para aktor dalam kontestasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menemukan dokumentasi program acara dialog interaktif di kedua TV; (2) memperoleh dokumen rekaman acara tersedia, peneliti memilih masing-masing lima acara dialog interaktif yang tersedia berdasarkan jumlah aktor yang terlibat dalam acara dialog walau tidak semua acara demikian karena ada yang hanya menghadirkan satu narasumber. (3) mendeskripsikan temuan dengan berfokus pada isu-isu yang diperbincangkan, aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan yang diperjuangkan.

HASIL PENELITIAN

Ruang publik yang tercipta di tingkat lokal dengan berdirinya LPP Lokal membuka peluang untuk terciptanya kontestasi gagasan dan kepentingan oleh berbagai aktor di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan di tingkat lokal diharapkan menjadi lebih sensitif dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi berbagai kepentingan publik lokal. Melalui kontestasi di ruang publik tercipta saluran bagi publik untuk mendiskusikan, menantang, mendebat berbagai pilihan kebijakan oleh pengambil kebijakan di luar ruang parlemen. Persoalannya, semuanya ini tergantung pada

bagaimana para pengelola LPP lokal ini memberi ruang kepada berbagai aktor lokal dalam kontestasi gagasan.

Kontestasi gagasan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, seperti yang sudah disinggung terkait dengan keberanian para pengelola LPP Lokal dalam menampilkan berbagai aktor di tingkat lokal. Idealnya, aktor-aktor dari masyarakat sipil memperoleh kesempatan yang sama untuk tampil dalam ruang publik sehingga kontestasi gagasan bisa mewakili berbagai kepentingan publik lokal. Kedua, kontestasi gagasan akan sangat tergantung kepada kemampuan komunikatif berbagai aktor, terutama aktor dari masyarakat sipil. Bagian ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya.

Kontestasi di Ruang Publik: Kasus Ratih TV Kebumen

Ratih TV Kebumen dikenal oleh warga masyarakat karena sejak awal keberadaannya sudah menyiarkan secara langsung dialog interaktif yang antara lain menampilkan Bupati Kebumen (2000-2008) yang menggagas keberadaan Ratih TV sebagai TV lokal di awal reformasi. Popularitas Rustriningsih sedikit banyak dibantu oleh karena kemunculannya hampir setiap hari di pagi hari menyapa warga Kebumen (Choi & Fukuoka, 2015; Putra, 2017) melalui acara dialog interaktif Selamat Pagi Bupati. Dalam perkembangannya, acara ini memang mengalami perubahan baik dari sisi nama maupun format yang digunakan. Bupati tak lagi tampil secara langsung, tetapi mulai diwakili oleh kepada dinas dan nama program juga berganti beberapa kali (Putra, 2016). Ratih TV secara konsisten juga mempertahankan acara dialog interaktif yang bertujuan memberi ruang pada publik untuk terlibat dalam kontestasi gagasan. Memang, aktor-aktor dalam masyarakat sipil atau dari sektor negara seperti anggota parlemen sering tidak mau menjadi narasumber dalam acara-acara dialog yang diadakan oleh Ratih TV, walau sudah diberikan kesempatan oleh pengelola siaran (Putra, 2017:150).

Berikut lima acara dialog interaktif yang dianalisis dengan melihat isu, aktor dan kepentingan menonjol.

Pertama, tema “Pembangunan SDM; Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional” ditayangkan 21 Mei 2018 pada Program Selamat Sore Kebumen dengan narasumber Mayor infantri Jumantar (Kasdim 0709/Kebumen), Nurtaqwa Setyabudi, SH (Kepala Kantor Kasbangpol Kabupaten Kebumen) dan Marjono, SE (Sekretaris Di Kominfo Kebumen)

Edisi ini membahas isu SDM dalam kerangka memperkuat pondasi kebangkitan nasional Indonesia di era digital dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Beberapa subtema yang dibahas antara lain tentang anasir-anasir perjuangan kepahlawanan yang harus diterjemahkan dalam konteks kekinian; pentingnya peran-peran digital dalam mendorong kecakapan publik dalam berbagai hal, terutama dalam konteks mendorong kerja-kerja pemahamann tentang keberagaman, pluralitas, dalam mempercepat komunikasi dan silaturahmi publik. Di samping itu juga dibahas isu kebangkitan nasional yang dapat menjadi stimulus dan sebagai upaya preventif dalam mendorong dan memfilter problem perkembangan media hari ini, seperti implikasi negatif semacam hoax, hate speech, dan problem yang sejenis.

Representasi aktor dalam dialog ini, serupa tetapi tidak sama. Serupa sebagai bagian dari representasi pemerintah karena dihadiri oleh unsur TNI dan dua Kepala Dinas yakni Kasbangpol dan Kominfo. Meskipun ketiganya berbicara dalam spektrum yang berbeda, representasi dalam satu frekuensi menjadi celah tersediri dalam merepresentasikan ruang-

ruang diskursif dalam ruang publik media lokal. Representasi ini belum sepenuhnya ideal karena tidak melibatkan instrumen demokrasi yang lain seperti *society*, meminjam istilah Habermas ruang-ruang dialog ini masih belum ideal untuk menjadi “tempat pengeraman kegelisahan politis warga” karena masih parsial dengan hanya satu narasumber dari kalangan pemerintah. Meskipun program tersebut sudah menyediakan saluran hubungan untuk warga, tetapi tak banyak -bahkan kerap kali tidak ada- masyarakat luas yang sekedar bertanya atas tema yang dibahas.

Jika dalam dialog ini juga ditampilkan wakil masyarakat sipil atau aktor-aktor non-negara, kontestasi persoalan kebangkitan nasional dalam konteks masa kini dengan kehadiran media digital akan memberi perspektif yang lebih komprehensif. Ketiadaan aktor non negara mengurangi potensi kontestasi yang lebih memberi warna dari berbagai sisi tentang pengembangan SDM yang akan sadar sejarah perjuangan dan semangat kebangsaan.

Kepentingan untuk membumikan kembali anasir-anasir perjuangan para pahlawan terdahulu terasa sangat menonjol. Pembumian ini bisa dalam berbagai bentuk; salah satunya adalah menjadi penyangga peran-peran penting dalam dunia digital. Semua narasumber tegas menyuarakan kepentingan ini. Di samping itu, ada juga kepentingan untuk melawan diseminasi informasi yang merugikan publik secara luas. Kepentingan lain terkait dengan usaha untuk menjelaskan perihal pemanfaatan media secara baik dan benar. Kepentingan ini hampir dinarasikan oleh seluruh narasumber.

Kedua, tema “Mengawal Tahapan Pilgub Jawa Tengah Juni 2018 ditayangkan pada 25 Mei 2018” pada Program Selamat Sore Kebumen dengan narasumber Solahuddin (Divisi Hukum KPUD Kebumen) dan Arif Supriyanto (Divisi Penindakan Panwaslu Kebumen)

Pemilihan isu pengawalan tahapan pemilu dalam dialog interaktif sebagai arena kontestasi gagasan dan kepentingan dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada bisa menjadi pesan penting tentang kesuksesan pelaksanaan pilkada.

Isu yang diangkat adalah tentang proses tahapan pemilu oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Kebumen dan proses ketaatan hukum terkait pelaksanaan tahapan teknis pemilu. Di samping itu juga ditekankan masalah kedaulatan pemilih. Dalam hal ini dapat diasosiasikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berdaulat tidak berdasarkan *money politic* dan sejenisnya. Problem ini menjadi salah satu titik penting dalam seluruh rangkaian pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Sebab hal ini terkait dengan kematangan demokrasi yang salah satu instrumennya adalah pemilu itu sendiri.

Representasi aktor hanya menampilkan penyelenggaraan pemilu dan pengawas pemilu. Pertama, Solahuddin sebagai representasi penyelenggara pemilu. Kedua, Arif Supriyanto yang merepresentasikan sebagai pengawas independen pemilu. Kedua aktor secara eksplisit telah merepresentasikan lembaga negara terkait penyelenggaraan pemilu. Belum tampak representasi *civil society* dalam diseminasi gagasan pada diskusi tersebut. Di sisi lain, absennya kelompok intelektual (peneliti dan pengamat) bahkan juga masyarakat umum juga menjadi celah tersendiri untuk melihat secara seimbang wacana tentang kepemiluan yang hendak ditunjukkan.

Kepentingan yang diusung dalam wacana tersebut setidaknya menyangkut dua konteks; Pertama, kepentingan untuk menyebarkan informasi mengenai teknis penyelenggaraan pemilu dan seluruh mekanisme di dalamnya. Kedua, kepentingan lain yang diusung lebih universal, menekankan pada kedaulatan pemilu yang menjadi basis dari

demokrasi. Penyelenggaraan teknis yang optimal tidak akan berarti apapun jika tidak diimbangi dengan kecakapan publik dalam memahami hal itu, maka pada akhirnya hanya menjadi buih gelombang, begitu nisbi.

Ketiga, tema “Integrasi dan Penguat Dasar Pengenaan Pajak” ditayangkan pada 4 Juni 2018 pada Program Selamat Sore Kebumen dengan narasumber Drs. Aden Andri Susilo, M.Si (Kepala Bappenda Kabupaten Kebumen) dan Ir. Retno Kusumastanti, M.M (Kepala Kantor KPP Pratama Kebumen).

Isu pajak memang lebih tepat menjadi isu kontestasi di level nasional, sementara di tingkat lokal fokus lebih kepada implementasi di samping pada lingkup yang terbatas menangani jenis pajak tertentu yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam dialog pada acara Selamat Sore Kebumen edisi 4 Juni 2018, tema yang dibahas terkait dengan Integrasi dan Penguat dasar pengenaan pajak. Secara detail pembahasan tentang ini terfragmentasi pada beberapa aspek, seperti proses pengintegrasian pajak terkait dengan database. Termasuk pegintegrasian data pajak antara pusat dan daerah. Sebab selama ini, terkait mekanisme pajak ini belum tampak matching. Di samping itu ada inovasi terkait mekanisme baru dalam pembayaran pajak.

Oleh karena pembahasan terfokus pada isu teknis, aktor yang ditampilkan adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan dan juga kepala kantor KPP Pratama Kabupaten Kebumen. Dua pembicara melambangkan state tidak ada representasi pelaku wajib pajak dan mungkin masyarakat yang konsen dalam dunia perpajakan. Mereka kerap kali menjadi imperatif-imperatif petugas pajak yang tujuannya untuk menarik pajak sebesar-besarnya. Dalam diskursus ruang publik, yang tampak dalam diskusi tersebut masih berkelindan dalam upaya penciptaan-penciptaan secara monologikal menurut desain-desain saran dan tujuan pemerintah.

Kepentingan untuk mempermudah akselerasi pertumbuhan pajak menjadi sangat mengemuka dengan cara mempermudah pelayanan dan teknis pembayaran pajak, sehingga sangat terlihat aroma kepentingan begitu menguat. Dalam diskursus tersebut tidak tampak adanya keberimbangan diskursus. Sehingga masyarakat yang membayar pajak itu seperti tidak menjadi public use of reason karena mereka sebenarnya dirugikan apa diuntungkan? Pada hal dalam negara modern yang mengandalkan pengelolaan negara berbasis pajak dikenal adagium “no tax without representation.” Jadi, ada yang kurang ketika membahas masalah pajak, tanpa ada representasi warga pembayar pajak sebagai bentuk konkrit wakil masyarakat sipil dalam kontestasi masalah pajak.

Keempat, Siaran Dialog Interaktif Selamat Sore Kebumen dengan tema, Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (Sutas 2018) disiarkan 28 Mei 2018 dengan narasumber Srihandayani (Kepala BPS Kebumen) dan Muhammad Muhairi, (Kasi Statistik & Produksi Kabupaten Kebumen)

Tema ini secara umum membicarakan seputar polarasi survey yang dilakukan oleh BPS. Ada beberapa isu yang dibahas seperti isu terkait dengan tempo survey antar sensus dalam sektor pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sutas pertanian ini dilakukan secara menyeluruh sehingga didapatkan data yang komprehensif mengenai sektor-sektor potensi pertanian di Kabupaten Kebumen. Di samping itu juga dibahas isu sensus penduduk dan sensus ekonomi. Penjabaran tentang dua sensus ini merupakan bagian integral dari upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait keberagaman sensus itu sendiri. Sebab selama ini sensus (termasuk sutas) hanya dipahami dalam konteks sensus penduduk saja, sehingga penjabaran secara teoritis terkait sensus yang menjadi tanggung jawab BPS

menjadi hal yang tidak bisa dielakkan, terutama untuk menstimulasi kecakapan publik secara holistik.

Aktor negara kembali tampil tanpa representasi aktor warga masyarakat sipil. Ini diwakili oleh Srihandayani selaku Kepala BPS Kebumen. Aktor lain adalah Kasi Statistik & Produksi Kabupaten Kebumen. Perbedaan dari narasumber pertama adalah narasumber ini lebih fokus pada teknis survey secara rigid. Dari teknis penggalian data, target, teritori, dan tim yang diterjunkan.

Kepentingan yang diusung tentu saja adalah seputar survey data sensus dalam dunia pertanian yang selama ini belum pernah dilakukan. Secara umum, kepentingan implementasi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kepentingan mengenai sutas pertanian ini termaktuk dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang sensus. Kepentingan berikutnya adalah kepentingan menggenjot produktivitas pertanian masyarakat yang sangat rendah. Jadi, diargumenasikan bahwa perlunya yang akurat dari survei.

Kelima, Tema “Bersama Melawan Narkoba” ditayangkan 25 Juni 2018 dalam Program Selamat Malam Kebumen dengan narasumber tunggal H. Nur Taqwa Setia Budi, Kepala Kesbangpol, Kebumen.

Masalah narkoba saat ini sudah menjadi masalah serius yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kualitas generasi muda mengingat generasi muda menjadi salah satu sasaran pemasaran narkoba. Pemilihan tema ini untuk menjadi tema dialog di ruang publik sangat tepat. Dalam diskusi ini, tema yang diketengahkan adalah melawan narkoba. Secara spesifik, tema ini berbicara mengenai persoalan narkoba di Kabupaten Kabumen. Tema ini membahas beberapa hal. Pertama, terkait asumsi yang berkembang di masyarakat tentang narkoba itu sendiri. Beberapa orang terutama pemuda sejak awal tidak pernah benar-benar paham perihal dampak berbahaya dari narkoba. Bahkan mengonsumsi narkoba tak pelak berangkat dari sebuah semangat ‘narsisme’ dari kaum muda dengan satu term sederhana; ‘keren’. Kedua, tentang langkah-langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran narkoba. Termasuk dalam hal ini adalah mekanisme pencegahan penggunaan narkoba. Sehingga langkah-langkah preventif ini kemudian menjadi titik keberangkatan dalam menekan tingginya penggunaan narkoba di Indonesia terutama di Kabupaten Kebumen. Sayangnya, dalam dialog yang membahas persoalan serius ini, hanya ada satu aktor yang menjadi pembicara. Itupun hanya aktor representasi pemerintah, yakni H. Nur Taqwa Setia Budi (Kepala Kesbangpol, Kebumen). Sebagai narasumber satu-satunya tentu saja ia bisa mengeksplorasi banyak hal secara lebih lama mengenai topik yang ia bahas. Sejak awal, ia menggunakan basis argumentasinya pada kecenderungan persoalan narkoba baik dari sisi dampak, maupun pencegahan. Termasuk dalam kaitannya dengan dampak psikis yang ditimbulkan dari banyaknya mengonsumsi narkoba. Sebagai pembicara tunggal, ia telah menjadi sentral dari keseluruhan tema besar mengenai narkoba itu sendiri. Jadi, tak ada kontestasi terhadap gagasannya tentang persoalan narkoba dan cara penanggulangannya. Meskipun ia otoritatif dalam berbicara mengenai narkoba, lagi-lagi dalam sebuah panggung, tak ada narasi discourse yang berimbang. Kepentingan yang mengemuka terfokus pada usaha untuk memberikan pandangan yang ‘lurus’ dalam konteks ancaman narkoba. Lebih daripada itu kepentingan untuk memerangi narkoba secara komprehensif tak bisa diabaikan. Dijelaskan bahwa selama ini peredaran narkoba justru lebih banyak berkelindan dalam masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga kelompok-kelompok ini perlu diberikan sentuhan-sentuhan baru dalam menepis jalur penyebaran tersebut. Termasuk mekanisme bagaimana melakukan pencegahan secara efektif. Dalam

diskusi ini, jelas kepentingan yang diusung adalah kepentingan masyarakat, tetapi argumentasi yang hanya bersumber sepihak menjadi keterbatasan tersendiri. Wujud pengayaan untuk menciptakan diseminasi gagasan yang seimbang nyaris tidak terjadi.

Justifikasi kontestasi

Berbeda dari ATV, arena kontestasi dalam media lokal Ratih TV Kebumen, wajah ruang publiknya lebih dimonopoli oleh pemerintah. Meskipun yang dibahas mengenai kepentingan masyarakat, ruang dialog dalam setiap program semuanya dikuasai oleh narasumber dari unsur pemerintah. Sehingga dalam konteks ini, seolah-olah pemerintahlah yang memiliki otoritas penuh untuk mendiskusikan isu-isu strategis publik. Justifikasi kontestasi dalam Ratih TV dapat dilihat pada diagram berikut:

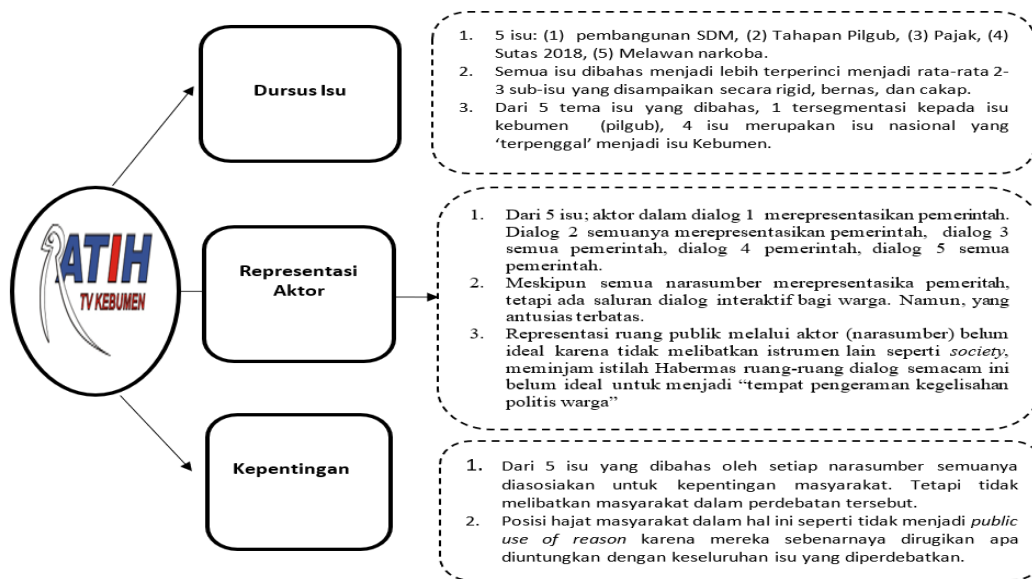


Diagram 1. Justifikasi Kontestasi Dalam Ratih TV

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Kontestasi di Ruang Publik: Kasus ATV Kota Batu

ATV Kota Batu saat riset ini diadakan menyiarkan beberapa acara dialog interaktif secara rutin seperti I Love Malang Raya dan Dialog Siang. Keterbatasan ruang penyimpanan program siaran menyulitkan peneliti untuk memperoleh seluruh program dialog interaktif selama setahun. Dari data yang bisa diperoleh, dokumen yang relatif cukup lengkap dalam waktu sebulan adalah program dialog interaktif pada bulan April 2018. Setelah mencermati acara dialog interaktif selama sebulan baik acara I Love Malang Raya maupun Dialog Siang, peneliti memilih tiga acara I Love Malang Raya dan dua acara Dialog Siang untuk dianalisis dengan pertimbangan antara lain pelibatan aktor masyarakat sipil dalam acara dialog ini.

Pertama, Tema "Peningkatan SDM Sejak Dini" ditayangkan 8 Mei 2018 pada Program I Love Malang Raya dengan narasumber Dr. H. Totok Songko (Wakil Rektor III Unitri), Kartika, SE, SPd (Kepala Paud IT Kartika Pradana Malang).

Isu yang mengemuka dalam dialog ini adalah masalah peningkatan kualitas SDM sejak dini. Isu ini dikaitkan dengan kecenderungan kehidupan modern yang bercirikan pada adanya peran publik bagi suami istri dalam keluarga. Apalagi mereka hidup di kota yang

mengharuskan mereka bekerja, mengejar karier sehingga anak-anak yang berada dalam usia dini kehilangan kesempatan pengasuhan. Baik suami maupun istri memiliki visi kehidupan yang hampir sama, bekerja dan sukses dalam dunia karier. Sebenarnya, di balik peran-peran tersebut, mereka juga ingin menuai sukses dalam mendidik anak sebagai bagian dari tanggungjawab mereka yang esensial.

Dalam situasi demikian, terjadi pergeseran sentra dalam pengasuhan anak. Ketika keluarga tidak cukup kuat menjadi titik sentral dari pola pengasuhan pendidikan anak di usia dini, maka PAUD menjadi satu-satunya “jalan lain” dalam problem krusial semacam itu. Tumpuan pendidikan usia dini luar sekolah menjadi jalan substitutif dalam mengisi celah keterbatasan pendidikan usia dini dalam unit keluarga.

Pemilihan narasumber sebagai aktor dalam kontestasi wacana pendidikan usia dini ini tampak tidak sepenuhnya representatif dan komprehensif dilihat dari latar belakang mereka, walau mereka berasal dari kelompok masyarakat sipil. Aktor yang ditampilkan adalah seorang Wakil Rektor di Unitri Malang dan aktor kedua adalah representasi dari praktisi yang secara distingtif berangkat dari seorang praktisi PAUD.

Di titik ini, dominasi pengamat dan praktisi menjadi bagian integral dari representasi civil society yang dominan. Absennya representasi aktor negara baik dari pemerintah maupun parlemen telah memberikan celah tersendiri bagi hadirnya diseminasi gagasan dalam ruang publik lokal. Ruang diskusi tersebut telah menjadikan diskusi kurang mampu memberikan jawaban bagi permasalahan penting pendidikan usia dini yang terkait dengan garis kebijakan publik. Di samping itu, tampaknya sangat penting juga menghadirkan mereka yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan usia dini yang berasal dari luar lembaga pendidikan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan usia dini.

Secara umum, kepentingan yang diusung oleh representasi aktor membias ke dalam kepentingan pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan dalam satuan pendidikan usia dini. Di samping itu mengemuka juga kepentingan untuk memaksimalkan pengelolaan pendidikan usia dini. Kehadiran diseminasi wacana dalam batang tubuh pelaku pendidikan sebagai bagian dari garda depan pendidikan usia dini juga penting diketengahkan. Mengemuka juga kepentingan untuk selalu mendekatkan anak didik dengan platform media baru bagi pengembangan SDM usia dini itu sendiri.

Dari wacana yang dikembangkan aktor dalam kontestasi ini sangat terlihat bagaimana kedua aktor mempromosikan pendidikan usia dini sebagai sesuatu yang penting dan oleh karena itu setiap penyelenggara pendidikan usia dini harus memiliki kompetensi yang relevan. Secara implisit, ada sebuah penawaran tentang gagasan, lembaga dan orang yang dibutuhkan untuk merealisasikan gagasan pendidikan usia dini. Kesan promosi lembaga jadi begitu kuat dalam kontestasi. Sebenarnya tak masalah seandainya aktor-aktor dalam kontestasi berasal dari spektrum yang lebih luas sehingga persoalan bisa didiskusikan secara lebih komprehensif dengan tawaran solusi yang lebih variatif.

Kedua, Tema “Edupreneur” ditayangkan 26 April 2018 pada program I Love Malang Raya dengan narasumber Maya Rintarini (Dosen UMM Malang) dan Oktavina Riski Utami Putri (Dosen UMM Malang).

Isu kewirausahaan (entrepreneurship) saat ini menjadi isu yang dibiicarakan di mana-mana sejalan dengan semakin banyaknya pengangguran terdidik yang sebagian besarnya berharap dapat ditampung di berbagai perusahaan atau lembaga yang ada. Ditengarai bahwa ini terjadi karena mahasiswa selama ini tidak memperoleh pembekalan dalam

kewirausahaan. Dialog dengan tema edupreneur ini harus ditempatkan dalam konteks ini. Isu yang didedahkan adalah terkait tentang ekonomi yang secara spesifik terfragmentasi pada isu Edupreneur. Tema ini diambil untuk menjelaskan konteks kebutuhan kekinian dunia usaha yang harus terintegrasi dengan sektor-sektor pendidikan.

Dalam dialog ini mengemuka beberapa isu penting seperti pentingnya pendidikan tinggi dalam mendorong semangat kewirausahaan, dan pentingnya perguruan tinggi memberi bekal yang lebih baik bagi mahasiswanya sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tak bisa dihindari kesan yang sangat kentara dalam dialog dengan tema ini sebagai bentuk terselubung promosi ide edupreneur dari UMM melihat dari kedua aktor dalam diskusi ini yang berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kategori representasi aktor dialog tersebut tampak ganjil. Dua narasumber merepresentasikan profesi dan latar belakang yang sama. Sama-sama berangkat dari profesi sebagai dosen dengan latar belakang Universitas Muhammadiyah Malang.

Pertama, Maya Rintarini, Dosen matematika di UMM ini merupakan salah satu penanggungjawab dari program edupreneur yang digagas oleh UMM. Sebagai representasi dosen -sekali-gus pananggungjawab dari kegiatan-, ia secara aktif membangun pondasi awal program ini melalui aktivitas pembelajaran di kampus. Sebagai akademisi, instruksi yang dibangun berdasarkan pengalaman akademik. Bahkan tak pelak ruang-ruang akademik ini menjadi semacam ekshibisi bahkan 'klinci percobaan' bagian diaspora kewirausahaan berbasis pendidikan di UMM. Dengan keterbatasan dunia praktis, sebagai pelaku kewirausahaan nyatanya tak banyak narasi yang dijelaskan perihal pengalaman dan persoalan-persoalan nyata di lapangan ketika praktek kewirausahaan itu benar-benar dijalankan.

Kedua, Oktavina Rizki Utami Putra, seperti halnya Maya, pembicara dalam diskusi ini juga memiliki latar belakang yang sama. Bedanya ia adalah penggagas dari kegiatan edupreneur tersebut, sehingga dalam konteks ini sebagai penggagas ia memiliki preferensi atas gagasan besar tersebut terkait pola, mekanisme, dan core business yang dijalankan. Narasi yang ia jelaskan juga memiliki justifikasi akademik yang hampir sama dengan rekannya; Maya. Dua aktor ini, yang memiliki representasi yang sama, tampak "invalid" bagi preferensi penonton untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Terutama terkait dengan proses, praktek, dan problem teknis di lapangan jika gagasan tersebut betul-betul menjadi gerakan nyata.

Tema yang menarik ini sebenarnya bisa diperdebatkan dengan menghadirkan aktor-aktor yang memang memiliki perhatian yang besar terhadap edupreneur, baik dari kalangan perguruan tinggi, para praktisi dan juga para pengambil kebijakan.

Kepentingan yang diperjuangkan terkesan sebagai bentuk promosi gagasan untuk menciptakan keunggulan kompetitif UMM. Ini bukan sebuah kontestasi yang layak untuk dimunculkan dalam ruang publik. Di samping itu, kepentingan lain adalah bagaimana generasi Muhammadiyah bisa menjawab kebutuhan dan arus besar globalisasi. Meskipun tampak sektarian tetapi narasi ini merupakan bagian penting dari usaha sadar antara kader Muhammadiyah dalam membangun jejaring kewirausahaan secara massif.

Ketiga, Tema "Pembelajaran komunikasi politik bagi masyarakat" ditayangkan pada 15 Mei 2018 dalam program I Love Malang Raya dengan narasumber Akhirul Amnillah, S.Sos, M.Si.

Dalam konteks kehidupan politik yang semakin demokratis mendiskusikan komunikasi politik tentu menjadi hal yang menarik dan bisa memicu diskusi yang lebih luas. Pemilihan tema pembalajaran komunikasi politik bagi masyarakat dalam dialog interaktif yang menyajikan kontestasi gagasan sangatlah tepat. Sayangnya, dalam dialog interaktif kali ini, peluang untuk terjadinya kontestasi gagasan tertutup dengan tampilnya hanya satu narasumber. Pandangan yang hendak dibangun dari tema ini adalah memahami komunikasi di dalam sistem politik yang di dalamnya terdapat partai politik, pemerintah, media dan juga masyarakat. Isu-isu yang mengemuka antara lain kesadaran politik masyarakat yang masih lemah; munculnya ancaman disparitas politik melalui medium komunikasi. Menjelang momentum politik, beberapa media yang kurang kredibel kerap memuat isu dan informasi yang tidak didasarkan pada fakta yang utuh. Isu-isu tersebut cenderung provokatif, bahkan tak pelak berpotensi partisan dan memihak salah satu kelompok politik.

Dalam dialog tersebut dihadirkan satu orang narasumber/aktor. Dialog ini tidak cukup memadai untuk menghadirkan ruang publik yang representatif yang menjadi ciri dari adanya representasi wacana dalam ruang publik. Sebagai representasi dari seorang akademisi ia hanya memberikan pemahaman cara-cara komunikasi politik yang baik kepada warga masyarakat khususnya dalam menghadapi momentum politik seperti pemilu baik pada tingkat nasional maupun pada skala daerah. Bahkan, ia juga menjelaskan terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat ketika mendapatkan informasi terutama tentang politik yang akurasi informasinya masih ambigu bahkan problematik.

Dalam diskusi tersebut, kepentingan akan kecakapan publik menjadi sentral. Kepentingan publik ini diasosiasikan melalui derajat penerimaan publik terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan oleh institusi politik seperti pemerintah dan partai politik. Muara kepentingan publik bertumpu pada adanya upaya literasi politik kepada warga masyarakat melalui dialog tersebut.

Bahkan menurutnya kepentingan pada kecakapan publik ini sangat signifikan, sebab ketika publik gagal menangkap agresi politik elite maka hal itu dapat menciptakan ledakan konflik sosial berkepanjangan. Politik mampu menyulut emosi masyarakat secara gradual. Demokrasi yang terbuka telah memungkinkan menciptakan arus komunikasi politik bergerak secara cepat. Bahkan secara eksplisit ia juga menjelaskan bahwa politik akan menciptakan masyarakat menjadi terbelah. Sehingga masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi secara akurat.

Kepentingan yang kedua adalah kepentingan pada upaya memproduksi pesan-pesan yang benar dari anasir-anasir sistem politik seperti partai politik, pemerintah, bahkan juga media. Di samping juga partai politik yang harus berperan dalam memproduksi wacana secara benar, media juga tidak kalah pentingnya dalam memproduksi informasi secara akurat. Ketiga, kepentingan pada hadirnya demokrasi yang mampu mendewasakan publik. Keberhasilan menciptakan iklim demokrasi yang seutuhnya adalah tujuan utama dari proses politik itu sendiri.

Tema yang menarik untuk memunculkan kontestasi terkait dengan isu semakin buruknya komunikasi politik di tengah kebebasan pers/media yang telah berlangsung sejak reformasi seharusnya menyadarkan pengelola ATV untuk menghadirkan narasumber yang lebih representatif baik dari para pengelola media yang di satu sisi tetap harus netral dan independen, tetapi di sisi lain kehidupannya tengah dirongrong baik sebagai bisnis maupun sebagai media lama yang harus menghadapi gempuran teknologi digital. Dampaknya sudah terasa dengan semakin terpolarisasinya warga masyarakat karena komunikasi politik yang

cenderung membelah warga masyarakat.

Keempat, Tema “Pelayanan Kesehatan Tertentu dan Kedokteran” ditayangkan 12 April 2018 pada Program Dialog Siang dengan narasumber dr. Wiwin Indriani (Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu) dan Sriwahyuni (Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata batu)

Pelayanan kesehatan di Indonesia sudah lama menjadi perhatian baik secara nasional maupun dari kalangan dunia internasional. Sebagai negara yang relatif baru terbebas dari rezim otoriter, masalah-masalah kesehatan penting yang selama Orde Baru bisa disembunyikan dengan berbagai cara, dalam sistem politik demokratis yang dicirikan oleh adanya kebebasan pers dan transparansi, masalah pelayanan kesehatan tak bisa lagi dibiarkan di ruang-ruang tertutup. Perhatian terhadap isu pelayanan kesehatan akan selalu muncul dari kalangan warga masyarakat.

Dialog dengan spesifikasi isu kesehatan ini mengangkat tema pelayanan kesehatan tertentu dan kedokteran. Meskipun tampak spesifik, tema ini diketengahkan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS dalam kelembagaan tersebut. Ada tiga isu yang mengemuka yakni penanganan penyakit yang diderita oleh anggota kepolisian ketika mereka dalam masa tugas, masalah standar pelayanan kesehatan bagi VIP, baik itu presiden maupun menteri, dan masalah pelayanan kepada masyarakat khusus berkaitan dengan visum atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan representasi aktor, tak ada ruang dialog yang simetris, sebab kedua pembicara dihadirkan dengan latar belakang yang sama. Sama-sama pengurus rumah sakit Bhayangkara Hasta Brata. Sehingga meskipun program itu menghadirkan dua pembicara, lagi-lagi topik dan arah pembicaraan akan bermuara pada satu diskursus semata, dalam satu spektrum, dan satu sudut pandang.

Pembicara pertama Wiwin Indriani, merepresentasikan dirinya sebagai seorang dokter yang secara otoritatif menjalankan standar pengobatan bagi mereka (Polri) yang secara khusus memiliki masalah dengan kesehatan ketika masa penugasan termasuk mengalami cedera akibat kecelakaan dan sejenisnya.

Sementara pembicara kedua, lebih kepada proses pelayanan secara teknis termasuk administratif dalam rumah sakit tersebut. Pembicara Sriwahyuni menjelaskan secara rinci bagaimana RS Bhayangkara melakukan spesifikasi pelayanan bertumpu pada pelayanan kedokteran kepolisian, termasuk penjelasan prosedur yang berkaitan tentang jeda waktu pengecekan makanan VIP dan potensi ketika memungkinkan hidangan tidak memenuhi standar. Bahkan juga prosedur bagaimana seseorang bisa memperoleh hasil visum secara gratis.

Setidaknya dalam dialog tersebut narasumber dengan satu latar belakang itu hanya berbicara pada tiga konteks kepentingan yakni kepentingan menginformasikan tugas dan tupoksi dari pegawai rumah sakit, soal pelayanan pada tamu VIP, dan kepentingan untuk memberi informasi kepada publik tentang visum kriminalitas.

Kelima, Tema “Mengenal Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ditayangkan 16 April 2018 dalam Program Dialog Siang dengan narasumber Bambang Paryano.

Isu lingkungan hidup yang sudah cukup lama menjadi perhatian pemerintah di Indonesia, sekitar awal tahun 1980-an, masih terus menjadi topik yang layak untuk menjadi bahan perdebatan atau diskusi. ATV dalam satu acara dialog siangnya membahas Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sayangnya, narasumber yang dihadirkan dalam dialog ini hanya satu orang. Terdapat beberapa isu yang mengemuka.

Pertama, isu perubahan regulasi lingkungan hidup sejak masa orde baru hingga sekarang. Kedua, isu kesadaran masyarakat akan lingkungan. Kesadaran ini bertumpu pada preferensi personal mereka untuk kemudian mengenal secara menyeluruh perihal ancaman yang mungkin ditimbulkan dari apa yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup.

Dialog ini akan lebih menarik sebagai sebuah kontestasi gagasan bila menghadirkan aktor-aktor baik dari sektor negara maupun masyarakat sipil dari berbagai perspektif. Dalam konteks representasi aktor, untuk mewujudkan diseminasi gagasan yang berimbang tampaknya dialog ini masih jauh panggang dari api. Sebab narasumber yang dihadirkan dalam program ini hanya satu representasi. Merepresentasikan sebagai NGO lingkungan hidup yang kerap kali melakukan kampanye pelestarian lingkungan hidup melalui organisasi Pusaka Foundation. Dengan latar belakang demikian, ia kerap kali menyebutkan dirinya sebagai pembela hak masyarakat untuk memperoleh preferensi yang utuh mengenai lingkungan hidup terutama berkaitan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagai pelaku NGO ia kerap kali melegitimasi dirinya sebagai pembela civil society. Dalam beberapa statemen ia kerap kali memperjuangkan tegaknya undang-undang lingkungan hidup yang diinisiasi oleh DPR seperti regulasi yang sudah ada selama ini.

Bahkan dalam beberapa konteks, lembaga yang ia jalankan serupa dengan NGO yang bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup seperti Walhi dan lembaga-lembaga yang sejenis. Sehingga isu-isu yang diperjuangkan adalah isu-isu yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan hidup, dan sebaliknya perjuangan-perjuangan yang dibangun adalah perjuangan yang anti privatisasi dan eksploitasi lahan-lahan strategis yang menjadi jantung dari lingkungan hidup itu sendiri. Ini isu yang menarik untuk wilayah Kota Batu dan sekitarnya sejalan dengan semakin berkembang industri pariwisata yang berdampak luas pada lingkungan hidup Kota Batu. Sayangnya, masalah krusial ini hanya dibahas oleh seorang narasumber sehingga tidak ada perspektif yang lebih komprehensif untuk menuju penguatan lingkungan hidup yang lestari. Memang hadirnya lembaga tersebut telah bisa mengkonfirmasi sejauh mana perjuangan atas civil society itu hadir, tetapi lagi-lagi wacana ruang publik tetap lebih elegan jika melibatkan banyak latar belakang sehingga wacana-wacana yang digagas menjadi hidup dan berimbang. Kepentingan yang diusung oleh narasumber adalah kepentingan menjaga kelangsungan lingkungan hidup secara baik. Kondisi lingkungan ini menjadi salah satu isu sentral yang ditegaskan oleh narasumber baik dalam kaitannya dengan perlindungan maupun tuntutan masyarakat. Dengan dialog semacam ini, maka ruang dialog tersebut tampak arketipe (meskipun tidak representatif) tentang hadirnya ruang publik yang ideal. Sebab dialog tersebut telah menjelma menjadi arena kegiatan komunikasi untuk menggalang solidaritas warga yang disebut sebagai "bertindak" (*handeln*) dalam konteks melindungi dan mengelola aspek lingkungan hidup sebagai isu sentral yang tidak bisa dikesampingkan. Bahkan dalam dialog ini kepentingan korporasi menjadi 'musuh bersama' para penggiat lingkungan hidup.

Justifikasi Kontestasi

Justifikasi atas kontestasi isu sebagai bukti sederhana dalam program ATV menjadi penting dikemukakan. Secara diskursus isu setidaknya ada 5 topik isu yang dibahas antara lain; (1) pendidikan usia dini, (2) edupreneur, (3) pelayanan kesehatan tertentu, (4) komunikasi politik, (5) lingkungan hidup. Semua isu dibahas menjadi lebih terperinci menjadi rata-rata 2-3 sub-isu yang disampaikan secara rigid, bernas, dan cakup. Kemudian dalam konteks representasi aktor, dari 5 isu yang ada; aktor dalam dialog 1 merepresentasikan

akademisi dan praktisi, dialog 2 semuanya akedemisi, dialog 3 semuanya aparat pemerintah, dialog 4 akademisi, dialog 5 aktivis ligkungan. Pada saat yang bersamaan dalam semua dialog tidak terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat bertanya maupun menyanggah. Sehingga ruang dialogis hanya bertumpu pada gagasan narasumber. Bahkan narasumber yang merepresentasikan civil society melalui kelompok akademisi dan praktisi lebih dominan daripada representasi state. Sementara dari sisi kepentingan, dari 4 isu yang dibahas oleh setiap narasumber semuanya diasosiasikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan orientasi dan intensi yang berbeda. 1 isu yakni tentang “pelayanan kesehatan tertentu” lebih pada sosialisasi atas kinerja rumah sakit kepolisian dan model pelayanan kesehatan bagi VIP seperti presiden dan menteri. Meskipun tidak ideal, apa yang dilakukan oleh oleh ATV sejatinya cukup proporsional:

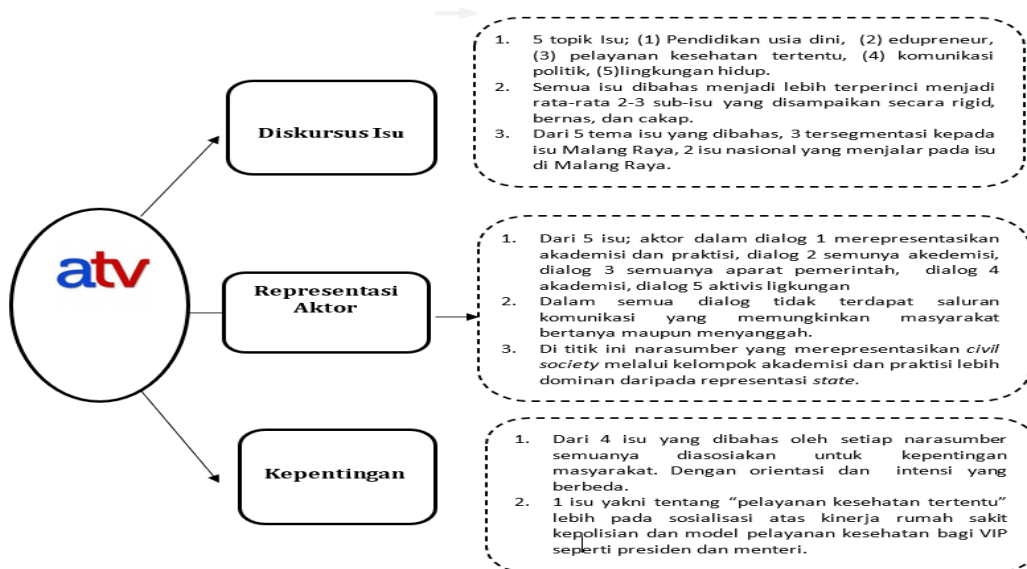


Diagram 2. Justifikasi Kontestasi Dalam atv

Sumber: Sumber: Analisis Peneliti, 2024

PEMBAHASAN

Adanya lembaga penyiaran publik lokal (LPP Lokal) baik di Kebumen maupun di Kota Batu sejak awal masa reformasi telah membuka ruang-ruang komunikasi di kedua daerah ini. Kedua media ini menjadikan banyak peristiwa yang diberitakan menjadi tampil ke permukaan/publik. Ini merupakan aspek visibility dari ruang publik (Statham, 2010:5). Kehadiran keduanya disemangati antara lain oleh adanya kebutuhan akan saluran komunikasi pada tingkat lokal yang bisa menjangkau seluruh warga yang ada di kedua wilayah itu, sehingga pesan-pesan atau informasi dari pemerintah dapat diketahui oleh warga masyarakat. Di balik itu harus diingat pula bahwa setiap penguasaan informasi dan media yang menyampaikannya adalah semacam kontrol terhadap kekuatan simbolik dan sekaligus juga kontrol terhadap pengetahuan warga masyarakat.

Kebijakan pengelola kedua media ini dari awal sudah memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk baik mengisi program acara dalam berbagai format, terutama yang berupa hiburan maupun dalam acara pendidikan dan budaya. Di samping itu, warga juga dapat menjadi bagian dari pemberitaan atau obyek pemberitaan ketika mereka membuat kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai berita. Dalam kerangka yang lebih luas, pengelola di

kedua media ini juga membuka ruang bagi mereka yang layak untuk menjadi narasumber dalam berbagai program dialog yang disiarkan. Dalam kasus Ratih TV, walau di awal kehadiran Bupati Rustriningsih seperti menjadi ikon penting Ratih TV, dalam perkembangannya sempat memberi ruang yang cukup besar kepada tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk membahas persoalan-persoalan aktual yang berkembang di wilayah Kebumen (Putra, 2016). Memang, pada akhirnya aktor-aktor yang muncul dalam perkembangannya kemudian lebih banyak yang berasal dari sektor negara, bahkan ketika Ratih TV sudah menyanggah status sebagai LPP Lokal. Hal yang sama juga terjadi dengan ATV Kota Batu. Idealnya, sebagai LPP Lokal, kedua media ini juga menjadi ruang publik seperti gagasan Habermas, menjadi sebuah tempat yang terbuka bagi publik untuk mendiskusikan secara rasional berbagai masalah bersama tanpa kendali dari berbagai kekuatan yang ada. Kedua media ini memberi ruang pada adanya kontestasi berbagai aktor dan kepentingan di tingkat lokal (Statham, 2010). Pada akhirnya, walau pun tidak sepenuhnya bisa mandiri, kedua media ini bisa diharapkan menjadi ruang publik yang sedikit banyak bisa mengontrol proses pembuatan kebijakan publik dan proses demokrasi di tingkat lokal (Aspinall & Berenchot, 2019; Guidry & Sawyer, 2003; Shin, 2019).

Dari data tentang kontestasi yang sudah disajikan, kedua media memang menampilkan komitmen dalam hal aktor yang dimunculkan. Dalam kasus Ratih TV, dominasi aktor pemerintah begitu dominan sehingga hampir tak ada aktor di luar negara yang muncul dalam acara dialog interaktif yang disiarkan oleh Ratih TV terutama dalam Program Acara Selamat Sore Kebumen. Dominasi aktor pemerintah yang muncul dalam dialog interaktif pada Ratih TV mengesankan Ratih TV masih menjadi lembaga penyiaran pemerintah yang bertugas menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada warga masyarakat melalui program dialog yang memberi tempat kepada warga masyarakat untuk terlibat melalui saluran telepon.

ATV Kota Batu memberi ruang yang lumayan untuk aktor-aktor non pemerintah dalam acara dialog interaktif yang mereka siarkan baik dalam acara I Love Malang Raya maupun dalam acara Dialog Siang. Akan tetapi, kedua acara dialog interaktif ini juga tidak sepenuhnya memberi ruang kepada munculnya kontestasi gagasan atau wacana mengingat ketika aktor non negara dimunculkan, tidak terjadi debat gagasan tentang berbagai isu yang menjadi tema dialog.

Jika dibandingkan, kedua media ini menyediakan acara dialog interaktif sebagai sebuah nama program yang sebenarnya digunakan oleh berbagai pihak untuk mengemukakan, mendefinisikan masalah dan menawarkan pemecahan masalah tanpa melibatkan partisipasi aktor yang lebih bervariasi untuk ikut melakukan definisi dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, acara dialog interaktif ini lebih merupakan acara untuk menyebarkan gagasan, ide atau pemasyarakatan berbagai gagasan oleh lembaga-lembaga yang ada di kedua daerah. Kalau Ratih TV lembaga-lembaga yang diberikan ruang dalam acara dialog ini mengutamakan lembaga-lembaga pemerintah, ATV memberi ruang kepada lembaga-lembaga di luar pemerintah memanfaatkan acara dialog interaktif untuk menyebarkan cara mereka mendefinisikan dan menyelesaikan masalah sehingga masyarakat diharapkan memahami isu, lembaga dan juga masalah yang ditangani oleh lembaga yang muncul.

Kedua media ini memang sudah berstatus sebagai LPP Lokal. Akan tetapi dari acara dialog interaktif ini terlihat ada perbedaan penting. Ratih TV justru masih menampilkan diri sebagai lembaga penyiaran pemerintah dengan memberi ruang yang sangat besar

kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk menyosialisasi program-program mereka atau untuk memperkenalkan lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat. Ruang untuk aktor masyarakat sipil dalam acara dialog ini hampir tak ada. Ini bisa jadi sebagai bentuk control oleh pengelola TV sehingga menjadikan Rustriningsih sebagai tokoh sentral di Kebumen yang membawanya pada kemenangan mutlak pada pemilihan kepala daerah Kebumen tahun 2005 (Choi & Fukuoka, 2015). ATV memberi ruang kepada lembaga non pemerintah untuk tujuan yang sama yakni mempromosikan diri dan program-program mereka di tengah-tengah masyarakat dengan label acara dialog. Sebuah acara dialog yang tidak sepenuhnya membuka ruang bagi keterlibatan publik dalam mendiskusikan berbagai tema yang telah dirumuskan oleh pengelola. Pihak swasta dan juga kelompok masyarakat sipil memperoleh ruang untuk memanfaatkan acara dialog interaktif dalam mempromosikan lembaga mereka, bukan mendiskusikan masalah-masalah kekinian yang dihadapi warga masyarakat.

Dari berbagai isu yang dibahas dalam dialog interaktif, tampaknya lebih menonjol isu yang menurut pemerintah dan menurut pengelola perlu dibahas, bukan isu atau masalah-masalah masa kini yang sedang dihadapi secara bersama. Semisal persoalan sumber daya manusia. Jika dicermati, permasalahan yang layak diangkat terkait dengan sumberdaya manusia adalah banyaknya tenaga kerja yang menjadi penganggur. Apakah ini SDM yang kurang berkualitas atau karena adanya kesalahan dalam pendidikan yang memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh dunia industri yang ada. Tentu Kota Batu dan Kabupaten Kebumen memiliki masalah SDM yang berbeda. Idealnya pemilihan isu yang akan diangkat dalam program dialog interaktif adalah isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh warga masing-masing daerah. Semisal untuk Kota Batu tentu akan sangat bagus kalau mengangkat isu pengalihan lahan pertanian menjadi hunian sebagai dampak perkembangan Kota Batu yang begitu pesat. Isu ini akan menyadarkan publik tentang perlunya tetap menjaga lingkungan Kota Batu yang memiliki fungsi sebagai kawasan pelindung daerah lain yang perlu dijaga. Hal yang sama juga terkait dengan isu kemacetan lalu lintas dan persoalan-persoalan perubahan komposisi penduduk yang terus akan mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan Kota Batu sebagai kawasan yang terus berkembang. Ini tentu berbeda dengan Kabuptan Kebumen yang memiliki wilayah luas dengan tingkat kemakmuran yang berbeda dengan warga Kota Batu.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kontestasi gagasan oleh aktor, wacana dan kepentingan yang terjadi di ruang publik dengan kasus pada Ratih TV Kebumen dan ATV Kota Batu? Dari analisis data yang sudah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan. Pertama, kedua ruang publik menyajikan tema yang relatif beragam sesuai konteks daerah dan juga konteks waktu acara berlangsung. Namun demikian, tema dalam isu yang dimunculkan belum sepenuhnya mencerminkan sebagai masalah bersama yang relevan untuk dibahas sebagai isu publik yang dihadapi oleh banyak orang di kedua wilayah. Kedua, masing-masing TV menampilkan aktor yang berbeda dalam kontestasi gagasan yang terjadi. Ratih TV Kebumen masih memberi tempat dominan pada aktor-aktor negara yang tampil dalam kontestasi gagasan di ruang publik. Oleh karena itu, kesan sebagai lembaga penyiaran pemerintah masih lebih dominan daripada sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang idealnya memberi ruang pada berbagai aktor untuk tampil dalam

kontestasi gagasan. Sebenarnya, ATV Kota Batu memberi ruang yang lebih besar kepada aktor masyarakat sipil. Sayangnya, pemberian ruang bagi aktor-aktor di luar negara masih terbatas pada lembaga yang ingin mempromosikan program kerja mereka melalui TV lokal. Di kedua TV, aktor yang tampil cenderung bukan dalam konteks kontestasi wacana, tetapi lebih sebagai promosi wacana dari aktor-aktor yang ditampilkan.

Program dialog interaktif yang disajikan di kedua TV belum sepenuhnya secara mandiri bisa dilihat sebagai ruang publik yang menampilkan debat rasional di antara berbagai aktor untuk mendiskusikan berbagai masalah. Para aktor sudah mendefinisikan masalah dan menawarkan cara penyelesaian masalah terhadap masalah yang sudah didefinisikan, bukan mendiskusikan masalah untuk memperoleh konsensus berupa usulan penyelesaian masalah.

Ketiga, kepentingan dominan yang diperjuangkan dalam kontestasi yang tak sepenuhnya terjadi adalah kepentingan aktor-aktor yang muncul dalam acara dialog, karena acara dialog interaktif yang dianalisis hanya menampilkan aktor-aktor yang berasal dari lembaga yang sama. Dialog yang berlangsung cenderung mengabaikan kepentingan publik terkait dengan berbagai masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama. Dialog tidak mampu menyajikan pro dan kontra atau kontroversi yang dari situ akan muncul berbagai cara pandang dalam melihat permasalahan dan juga cara yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan.

Penelitian ini berusaha untuk melihat LPP Lokal sebagai ruang publik yang memberi ruang kepada berbagai aktor untuk berdiskusi, berdebat tentang berbagai persoalan yang dihadapi bersama dalam lingkup lokal masing-masing. Temuan penelitian ini menunjukkan belum sepenuhnya LPP Lokal mampu berperan sebagai ruang publik yang memberi peluang berbagai aktor lokal dalam kontestasi wacana di ruang publik. Kesimpulan demikian bisa jadi karena riset ini tidak memilih data program acara secara acak dengan menempatkan seluruh program acara dialog interaktif sebagai sampel. Ini dilakukan mengingat keterbatasan dokumen program yang bisa diakses sehingga dokumen yang bisa diakseslah yang dijadikan data untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berpretensi untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh acara program dialog interaktif.

REFERENSI

- Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181>
- Aspinall, E., & Berenhot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Astuti, B. W. (2015). *Pertarungan Kepentingan di Ruang Publik: Membangun Program Dialog Interaktif yang Demokratis di Radio Suara Salatiga FM*. Universitas Gadjah Mada.
- Blumler, J. G. . (2018). *The Crisis of Public Communication, 1995–2017*,. Routledge, Taylor & Francis.
- Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1995). *The Crisis of Public Communication*. Routledge.
- Buehler, M. (2010). *Decentralization and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation*

- of the Public Sphere. In *Problems of Democratisation in Indonesia* (pp. 267–285). ISEAS.
- Butsch, R. (2007). *Media and Public Sphere*. Palgrave MacMilan.
- Choi, I., & Fukuoka, Y. (2015). Co-opting Good Governance Reform: The Rise of a Not-so-Reformist Leader in Kebumen, Central Java. *Asian Journal of Political Science*, 23(1), 83–101. <https://doi.org/10.1080/02185377.2014.982666>
- Clemens, E. S. (2010). Democratization and Discourse: The Public Sphere and Comparative Historical Research. *Social Science History*, 34(3), 373–381. <https://doi.org/10.1215/01455532-2010-005>
- Dhakidae, D. (1991). *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism*. Cornell University.
- Ettema, J. E., Whitney, D. C., & Wackman, D. . (1987). Professional Mass Communicators. In C. H. Berger & Chaffee (Eds.), *Handbook of Communication Science* (pp. 747–780). Sage.
- Faisal, A., Putra, H. S. A., & Nugraha, W. C. R. (2018). WARUNG KOPI, MEDIA DAN KONSTRUKSI RUANG PUBLIK DI MAKASSAR. *Journal Communication Spectrum*, 7(2). <https://doi.org/10.36782/jcs.v7i2.1839>
- Guidry, J. A., & Sawyer, M. Q. (2003). Contentious Pluralism: The Public Sphere and Democracy. *Perspectives on Politics*, 1(2), 273–289. <https://doi.org/10.1017/S1537592703000203>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. the MIT Press.
- Koopmans, R., & Statham, P. (2010). The making of a European public sphere: Media discourse and political contention. In *The Making of a European Public Sphere: Media Discourse and Political Contention*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511761010>
- McLaverly, P. (1998). The public sphere and local democracy. *Democratization*, 5(3), 224–239. <https://doi.org/10.1080/13510349808403579>
- Putra, I. (2016). Transformasi Penyiaran Pemerintah Menjadi Penyiaran Publik: Studi Kasus pada Ratih TV Kabupaten Kebumen. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 2016: Kecerdasan Komunikasi, Sendi Kehidupan Bangsa*.
- Putra, I. (2017). Penyiaran Publik Lokal sebagai Ruang Publik: Studi Kasus pada Ratih TV Kebumen. In F. Junaedi (Ed.), *Mediamorfosa: Transformasi Media Komunikasi di Indonesia*. Buku Litera.
- Qodir, Z. (2011). Public sphere contestation: Configuration of political Islam in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 123–149. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.123-149>
- Qodir, Z. (2015). Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik : Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura. *Harmoni*, 14(1), 38–52.
- Shin, Y. (2019). Local Public Sphere and Informational Politics. In M. H. Tatum (Ed.), *A Closer Look at Political Communication* (pp. 1–20). Nova Science Publishers.

Statham, P. (2010). Introduction: Europe's Search for a Public. In R. Koopmans & P. Statham (Eds.), *The Making of a European Public Sphere: Media Discourse and Political Contention* (pp. 1–10). Cambridge University Press.

Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Application: Design and Methods* (6th ed.). Sage.